

## RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

### I. IDENTITAS PENILAI

Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Budi, Edy, Saptono dan Rekan merupakan suatu badan hukum yang berbentuk persekutuan yang telah memiliki Izin Usaha dari Menteri Keuangan Nomor : 2.09.0033 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 402/KM.1/2009, tanggal 22 April 2009 yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Proposal Jasa Penyusunan Pendapatan Kewajaran No. 004/bs-BEST/RAIN-FO/I/23, tanggal 18 Januari 2023.

### II. RINGKASAN PENILAIAN

#### a. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan pendapat kewajaran adalah untuk memberikan gambaran kewajaran atas rencana Perseroan dan IBP untuk melakukan penyewaan ruang kantor beserta furnitur dan perlengkapannya.

Maksud dari penyusunan pendapat kewajaran adalah untuk memenuhi POJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.

#### b. Obyek Rencana Transaksi

Obyek Rencana Transaksi dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah rencana transaksi penyewaan ruang kantor beserta furnitur dan perlengkapannya.

#### c. Tanggal Penilaian

Tanggal efektif penilaian adalah per 31 Desember 2022, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

#### d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian usaha bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Laporan pendapat kewajaran ini kami persiapkan untuk memenuhi persyaratan, khususnya dalam mendukung Perseroan untuk memperoleh pandangan yang wajar dari sisi pendapat yang independen terkait dengan Rencana Transaksi penyewaan ruang kantor beserta furnitur dan perlengkapannya, dimana pendapat kewajaran ini akan ditujukan kepada para pemegang saham, namun tidak ditujukan untuk selain hal tersebut. Jika terdapat pihak-pihak lain yang menggunakan laporan ini untuk tujuan lain, maka kami menyatakan bahwa laporan ini tidak bisa digunakan, termasuk sebagai acuan atau ditunjukkan kepada pihak lain, kecuali jika atas perintah pengadilan atau pihak berwenang, tanpa izin tertulis dari kami. KJPP BEST tidak bertanggung jawab atas penggunaan isi laporan ini kepada pihak lain diluar Perseroan.
- Dalam melakukan penugasan profesional, penilai telah melaksanakan penilaian secara independen.

- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Penilai usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian usaha bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Penilai usaha bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.
- Kami telah memperoleh informasi bahwa tidak terdapat masalah hukum atas objek penilaian.
- Laporan pendapat kewajaran yang menyatakan hasil analisis, pendapat dan kesimpulan ini, dibuat berdasarkan pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII-2018 dan POJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
- Laporan keuangan proforma Perseroan per 31 Desember 2022 disusun oleh Manajemen Perseroan dan PTS.
- Menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh Manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Data proyeksi laporan keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi serta dampak keuangan dari Rencana Transaksi kami peroleh dari Manajemen Perseroan.

#### e. Metodologi Penilaian

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, Penilai telah melakukan analisis sebagai berikut :

- Analisis Transaksi
- Analisis Kualitatif
- Analisis Kuantitatif
- Analisis Kewajaran Transaksi

#### f. Kesimpulan

Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran transaksi, kami berpendapat bahwa rencana transaksi afiliasi melalui transaksi penyewaan ruang kantor beserta furnitur dan perlengkapannya yang dilakukan PT Resource Alam Indonesia, Tbk adalah wajar.

## **SUMMARY OF THE FAIRNESS OPINION**

### **I. Appraiser Identity**

Public Appraisal Service Consultant (KJPP) Budi, Edy, Saptono and Partners is a legal entity in the form of an association that already has a Business License from the Minister of Finance Number: 2.09.0033 through the Decree of the Minister of Finance Number: 402/KM.1/2009, dated April 22, 2009 appointed by the Company based on Proposal for Compilation of Fairness Income Services No. 004/bs-BEST/RAIN-FO/I/23, dated 18 January 2023.

### **II. Appraisal Summary**

#### **a. Purpose and Objective**

The purpose of preparing a fairness opinion is to provide a fairness description of the Company's plan to lease office space and its furniture and equipment.

The purpose of preparing the fairness opinion is to comply with POJK No. 42/POJK.04/2020 Concerning Affiliated Transactions and Conflicts of Interest Transactions.

#### **b. Transaction Plan Object**

The object of the Proposed Transaction in preparing this fairness opinion is the proposed transaction for renting office space and its furniture and equipment.

#### **c. Appraiser Date**

The effective date of the valuation is December 31, 2022, where the limit is taken on the basis of consideration of the interests and objectives of the valuation.

#### **d. Assumptions and Limiting Conditions**

- Business appraisal report is a non-disclaimer opinion.
- We have prepared this fairness opinion report to fulfill the requirements, especially in supporting the Company to obtain a fair view from an independent opinion related to the Proposed Transaction for renting office space and its furniture and equipment, where this fairness opinion will be addressed to shareholders, but not intended for anything other than that. If there are other parties who use this report for other purposes, we declare that this report cannot be used, including as a reference or shown to other parties, unless ordered by a court or the authorities, without written permission from us. KJPP BEST is not

responsible for the use of the contents of this report to other parties outside the Company.

- In carrying out professional assignments, appraisers have carried out independent assessments.
- Appraiser has conducted a review of the documents used in the appraisal process.
- Data and information obtained comes from sources that can be trusted for accuracy.
- The business appraiser is responsible for the implementation of the appraisal and the fairness of the financial projections.
- Business appraisal reports are open to the public unless there is confidential information that may affect the company's operations.
- The business appraiser is responsible for the fairness opinion report.
- We have received information that there is no legal issue regarding the object of the valuation.
- The fairness opinion report stating the results of this analysis, opinion and conclusion, was prepared based on the Indonesian Assessment Standards (SPI) Edition VII-2018 and POJK No. 35/POJK.04/2020 concerning Assessment and Presentation of Business Valuation Reports in the Capital Market.
- The Company's pro forma financial statements as of December 31, 2022 were prepared by the Company's Management and PTS.
- Use adjusted financial projections that reflect the fairness of financial projections made by Management with their fiduciary duty.
- Data on the projected financial statements before and after the Transaction Plan and the financial impact of the Transaction Plan we obtain from the Company's Management.

e. Assessment Approach and Methodology

In compiling the Fairness Opinion on the Transaction Plan, KJPP BEST has carried out the following analysis:

- Transaction Analysis
- Qualitative Analysis
- Quantitative Analysis
- Transaction Fairness Analysis

f. Conclusion

Based on the transaction analysis, qualitative analysis, quantitative analysis and analysis of the fairness of the transaction, the appraiser is of the opinion that the plan for affiliated transactions through transactions involving the leasing of office space and its furniture and equipment by the Company is reasonable.